

**TESIS**

**REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA  
UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

***REFORMULATION OF CRIMINAL CONFISCATION REGULATIONS ON  
GENERAL CONFISCATION RELATED TO CRIMINAL ACTIONS  
PROVEN TO CAUSE STATE FINANCIAL LOSS***



**Oleh:**

**ISMI KHAIRUNISA**

**NIM. 2210622039**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**TESIS**

**REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP  
SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**REFORMULATION OF CRIMINAL CONFISCATION  
REGULATIONS ON GENERAL CONFISCATION RELATED  
TO CRIMINAL ACTIONS PROVEN TO CAUSE STATE  
FINANCIAL LOSS**



**Oleh:**

**ISMI KHAIRUNISA**

**NIM. 2210622039**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP  
SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG  
MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ISMI KHAIRUNISA**

**NIM. 2210622039**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:

**ISMI KHAIRUNISA**

**NIM. 2210622039**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Pembimbing 2**



**Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M.**  
NIP. 198709222018031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904  
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM  
TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:

**ISMI KHAIRUNISA**

**NIM. 2210622039**

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Pada Tanggal **5 Januari 2026**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIP. 216121211

Pembimbing 2

Dr. Beniharmoi Harefa, S.H., L.L.M.  
NIP. 198709222018031002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sulherman, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,  
M.H.  
NIP. 198910192025211048

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ismi Khairunisa  
NIM : 2210622039  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ismi Khairunisa  
NIM. 2210622039

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Khairunisa

NIM : 2210622039

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 April 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ismi Khairunisa  
NIM. 2210622039

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
6. Yang Terkasih Suamiku Alfan Halifa Pasha, S.H., M.Kn. dan Anak-anakku Raffasya Aulia Pasha dan Hanif Alkhalifi Pasha, terima kasih atas kesetiaan

menemani serta memotivasi penulis dan telah menjadi obat penyemangat bagi Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

7. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Bambang Sindhu Pramana dan Ibunda Dewi Sumiyati dengan ketegasan di balik kelembutan hati Beliau telah memberikan saya banyak makna dalam hidup dan terus memotivasi untuk terselesaikannya tesis ini.
8. Adik serta Kakak Penulis terkasih, Hanifa Chandra Dewi, Intan Amanah dan Mba Dhea terima kasih dukungan dan doanya selama penulis berkuliah sampai menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan terbaik Penulis di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, 5 Januari 2026

Penulis

Ismi Khairunisa

## ABSTRAK

### REFORMULASI PERATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM TERKAIT PERBUATAN PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ismi Khairunisa (2210622039), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

Konflik kewenangan antara sita pidana dalam hukum acara pidana dan sita umum dalam hukum kepailitan merupakan persoalan yuridis yang terus muncul dalam praktik peradilan di Indonesia. Sita pidana berfungsi untuk mengamankan barang bukti demi kepentingan pembuktian tindak pidana, sedangkan sita umum kepailitan bertujuan menjamin pelaksanaan pemberesan harta pailit yang berada di bawah penguasaan kurator. Persinggungan tersebut menjadi persoalan ketika objek yang telah masuk ke dalam boedel pailit kemudian disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses pidana. Ketidakjelasan norma mengenai mekanisme prioritas dan penyelesaian konflik antara dua rezim hukum ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tampak pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan inkonsistensi dalam memutus perkara serupa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis putusan untuk mengkaji pengaturan kewenangan sita pidana dan sita umum kepailitan serta merumuskan pembaharuan pengaturannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan reformulasi hukum untuk mengharmonisasikan pengaturan mengenai sita pidana dan sita umum melalui penegasan hierarki kewenangan, mekanisme koordinasi antara kurator dan penyidik, serta pedoman yudisial guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditur dalam proses pemberesan harta pailit. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma khusus yang mengatur prioritas sita dan tata cara penyelesaian konflik antar-regulasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemulihan kerugian negara.

**Kata Kunci:** sita pidana; sita umum kepailitan; kurator; penyidik; kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF CRIMINAL CONFISCATION REGULATIONS ON GENERAL CONFISCATION RELATED TO CRIMINAL ACTIONS PROVEN TO CAUSE STATE FINANCIAL LOSS**

Ismi Khairunisa (2210622039), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

*This study aims to analyze the implementation of prosecution termination based on restorative justice in Domestic Violence (DV) cases, as regulated in the Indonesian Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. The research is grounded on the legal opportunity that allows prosecutors to discontinue DV cases when specific conditions are met, including a voluntary reconciliation agreement, the offender's acknowledgment of wrongdoing, and restitution or recovery for the victim. The urgency of this research lies in balancing formal law enforcement with a more humanistic and victim-centered approach. The study employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches, supported by literature review. The findings reveal that implementing restorative justice in DV cases faces significant challenges, such as power imbalances, the risk of re-traumatization, and limited regulatory and institutional capacity. Nevertheless, when applied with caution, strict procedures, and adequate legal and psychological support, restorative justice can serve as an effective instrument for achieving true victim recovery, restoring human dignity, and fostering substantive accountability from the offender. This research concludes that restorative justice should not merely be seen as an alternative to prosecution but as a meaningful path toward a more humane and substantial form of justice.*

**Keywords:** Domestic Violence; Offender Accountability; Prosecution; Restorative Justice; Victim Recovery.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kerangka Pikir .....	22
C. Definisi Operasional.....	23
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN .....	29
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sifat Penelitian.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Sumber Bahan Hukum .....	33

<b>F. Teknik Analisis</b> .....	35
<b>BAB IV</b> .....	37
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
<b>A. Pengaturan Sita Pidana Dan Sita Umum Dalam Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana Yang Terdapat Kerugian Keuangan Negara</b> .....	37
<b>B. Reformulasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pailit Guna Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Kreditur</b> .....	58
<b>BAB V</b> .....	64
<b>PENUTUP</b> .....	64
<b>A. Kesimpulan</b> .....	64
<b>B. Saran</b> .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68